

# Laporan Tahunan



# 2008

1 Januari - 31 Desember 2008

*Laporan Tahunan*

# **PUSHAM-UII**

1 Januari - 31 Desember 2008



# LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

I Januari - 31 December 2008

## Februari 2008

Penyusun

Ikhsan

Elho Riyadi

La Ode Arham

Supriyanto Adhi

Nova U. Utomo

Adri Bruce Pratomo

Penerjemah

Nova U. Utomo

Supriyanto Adhi

Layout & Desain Sampul

Tarkim

Foto Dokumentasi

P/08001-081

Jenabegi RT. 11 RW. 10 Gg. Balung No. 517 A  
Sempurjayan, Randu, Yogyakarta 55198  
Telp. (0274) 452002 / Fax. (0274) 452118  
Website: <http://www.pusham.uii.ac.id>  
e-mail: [pusham@iisyafooo.com](mailto:pusham@iisyafooo.com)

## Sambutan

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta kembali berulang tahun dan tahun ini adalah ulangya yang ke-8. Pada tahun ini PUSHAM UII tetap konsisten dengan semangat awal pendirian lembaga ini yaitu melakukan penguatan hak asasi manusia melalui jalur pendidikan dan advokasi.

Pada tahun ke-8 ini PUSHAM UII kembali menepuhkan semangat awal pendirian lembaga ini dengan secara konsisten mengembangkan berbagai program yang berisi pendidikan dan advokasi. Pendidikan sengaja dipilih sebagai vihi besar kelembagaan karena pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan perubahan. Pendidikan memang membutuhkan waktu yang panjang untuk dikatakan berhasil, namun kesuksesan pendidikan

juga akan membawa dampak perubahan yang panjang dan berkelanjutan.

Advokasi dipilih sebagai sarana untuk melengkapi usaha perubahan lewat pendidikan. Advokasi menghendaki perubahan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga advokasi dapat menyelesaikan masalah sementara untuk jangka yang panjang, perubahan dapat dilakukan dengan metode pendidikan.

Misi pendidikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang humanis, berkeadilan dan demokratis. Misi tersebut dapat berjalan dengan kerjasama antara PUSHAM UII dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norwegia. Kerjasama antara kedua institusi ini

telah berjalan sejak tahun 2004. Pada tahun ini program kerjasama antara PUSHAM UII dan NCHR mengalami beberapa perubahan yaitu sebagian besar program diarahkan untuk membendayakan masyarakat Indonesia untuk membuat informasi dengan melakukan riset. Terdapat dua riset besar yang dilakukan antara lain pertama, riset tentang pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat, dan kedua, riset tentang pemenuhan hak atas pendidikan dan perumahan di Indonesia. Selain program riset juga dilaksanakan beberapa workshop yaitu berkaitan dengan model pengajaran buku hak asasi manusia untuk murid SMA dan workshop tanggungjawab sosial perusahaan.

Tahun ini PUSHAM UII masih terlibat dalam program besar yaitu Reformasi Peradilan dan reformasi kepolisian. PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi

Nadiala Republik Indonesia melakukan penelitian putusan hakim yang bermuansa hak asasi manusia di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mengetahui kualitas putusan hakim dan secara spesifik untuk mengetahui kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap putusannya. PUSHAM UII juga bekerjasama dengan The Asia Foundation dalam rangka melaksanakan berbagai program reformasi kepolisian melalui program COP (Community-Oriented Policing).

PUSHAM UII tetap menaruh perhatian pada isu kekerasan negara pada zaman orde baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian tentang Komando Jihad bekerjasama dengan ELSAM.

Pada akhirnya, selaku Direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan

PUSHAM UI, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan Universitas Islam Indonesia atas dukungan moral maupun materiil sehingga lembaga ini bisa berkontribusi bagi masyarakat luas. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway, The Asia Foundation, Partnership for Government Reform in Indonesia (PGRI), Komisi Yudisial, Kantor Departemen Hukum dan HAM RI, KOMNAS HAM, KOMNAS Perlindungan Anak, KOMNAS Perempuan, Lembaga Perlindungan Sakral dan Korban (LPSK RI), ELSAM, seluruh jaringan PUSHAM se-Indonesia, LBH Jogja dan semua lembaga mitra PUSHAM UI atas kerjasamanya.

Secara khusus, selaku Direktur saya mengucapkan terimakasih kepada Ip. M. Buyeo Mardias, S.H., M.Hum

(Direktur Kerjasama), Eko Prasetyo, S.H. (Direktur Program), juga kepada seluruh staf (Eko Riyadi, Imran, Supriyanto Abdi, La Ode Arham), staf kantor (Unun, Nova, Arwin, Wid, Ima, Juni, Gandang, Dwi, Mansu, Yatman, Anton), kepada seluruh relawan (Duhdan, Rono, Adik, Eman, Iman, Syahli, Koki, Nur, dkk) terimakasih atas kerja kerasnya. Terakhir, kami mengucapkan terimakasih kepada semua dosen pakar atas semua sumbangan pemikirannya. Semoga kami tetap bisa konsisten dan lebih baik pada masa yang akan datang.

Suparman Akrizki, S.H., M.Si  
Direktur PUSHAM UI

## Tentang PUSHAM UII

### Sejarah

Pusham UII secara resmi berdiri pada 20 April 2000 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia no 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi disertai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia No 44/B.6/19/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, MA.

Surat Keputusan Badan Wakaf dan Rektor Universitas Islam Indonesia itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor

Universitas Islam Indonesia dengan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.

Latarbelakang pembentukan PUSHAM adalah kesadaran dan keprihatinan yang mendalam civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi Hak Asasi Manusia yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, sejarah Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran HAM, penderitaan dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha meningkatkan kondisi HAM di negeri ini.

Pada saat yang sama, Kementerian

Negara Unsur Hak Asasi Manusia yang baru dibentuk waktu itu juga mempunyai concern yang sama, dan kesamaan concern untuk mendiseminasikan dan mempromosikan HAM inilah yang melahirkan nota kesepahaman tersebut di atas.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari segala kepentingan apapun. Sifat independen dari PUSHAM UII adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, personel pengurus, serta kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

#### Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian Hak Asasi Manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktik HAM bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menertapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.



## Daftar Isi

Rangkaian Program  
Community Oriented Policing (COP) 1

Survey Hak Asasi Manusia dan  
Politik Syariat Islam di Indonesia 4

Riset Putusan Hakim Berbasis  
Hak Asasi Manusia Tahap II 6

Launching Buku Ajar  
"Hukum Hak Asasi Manusia" 7

Workshop  
Tanggungjawab Sosial Perusahaan 9

Penelitian Komando Jihad Tahap II:  
Mengungkap Suara Korban 11

Riset dan Workshop  
Hak Masyarakat Adat 13

Launching Buku Ajar Hak Asasi  
Manusia, Edisi Guru SMA 15

Riset dan Workshop Status  
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan  
dan Perumahan di Panggreh-  
Aeoh Darussalam, D.I.Yogyakarta  
dan Kalimantan Timur 17

Workshop Model Pengajaran  
Buku Ajar Hak Asasi Manusia,  
Edisi Guru SMA 19

Bagian Umum 21

Realisasi Program Tahun 2008 23

Struktur organisasi 25

Laporan keuangan 26

# Program

## RANGKAIAN PROGRAM COMMUNITY ORIENTED POLICING (COP)

### Latarbelakang

Community Oriented Policing (COP) merupakan program hak asasi manusia dibidang reformasi keamanan. Program ini sangat sejalan dengan agenda reformasi POLRI yang mengeluarkan regulasinya di bidang COP atau Pengelompokan Masyarakat (POLMAS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri No.7 tahun 2008 yang dikeluarkan 13 Oktober lalu.

Program tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang intinya adalah membangun komunikasi dan kerjasama antara Polisi dan masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah keamanan di masyarakat. Program ini diselenggarakan di berbagai wilayah di Yogyakarta dan Klaten: Malloboro, Mergangsan, Umbulharjo, Depok Barat,



Basugutapas, Kalonproga, dan Delanggu di Klaten. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai instansi dan jajaran kepolisian mulai dari Polda DIY hingga Polsek-polsek di wilayah/wilayah program COP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mendorong kapasitas Polje COP dalam menjalankan kemitraan antara Polisi, pemerintah lokal dan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah keamanan.
2. Memetakan berbagai persoalan

keamanan di Yogyakarta

3. Mengkampanyekan dan melakukan berbagai pendidikan HAM di masyarakat.



## Berkas

1. Penguatan Kapasitas Pokja COP  
Penguatan kapasitas Pokja COP dimaksudkan untuk lebih memberikan kemampuan baik organisasi, pengorganisasian maupun pemecahan masalah sosial di masing-masing wilayah kerja pokja COP, sehingga di kemudian hari pokja COP dapat berjalan secara mandiri tanpa pendampingan dari pihak lain. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan publik, pertemuan masyarakat dan pelatihan. Semua kegiatan diarahkan pada hal-hal praktis dilapangan untuk memperkuat

masyarakat dan pokja COP

2. Penelitian Model Keamanan Masyarakat  
Kegiatan ini adalah untuk melihat lebih dalam persoalan dan aktor keamanan di beberapa wilayah kerja pokja COP. Kegiatan ini di format dalam bentuk riset dengan melakukan wawancara mendalam di beberapa wilayah di Yogyakarta dan Klatis.
3. Penerbitan Buletin  
Buletin ini adalah media informasi semua program COP yang dijalankan oleh PUSHAM UI yang terdiri dari dua bulanan sekali, selain di isi kegiatan COP juga diisi dengan tulisan-tulisan kritis tentang berbagai persoalan masyarakat yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
4. COP Budaya



COP Budaya dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi kegiatan dan program COP melalui budaya masyarakat setempat di wilayah kerja Pokja COP.



Hal ini untuk lebih mendekatkan program ke masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang program-program COP tersebut.

5. Penyusunan Modul Training-Gender. Minimnya partisipasi kaum perempuan dalam program COP membuat PUSHAM UI menyusun modul training gender bagi Pokja COP selain itu untuk membangun sensitifitas gender dalam program-program COP yang saat ini masih berlangsung dan dengan begitu persoalan keamanan dalam COP tidak saja diikuti oleh laki-laki tetapi juga ada keterlibatan perempuan didalamnya.

#### Hasil

1. Terbentuknya Pokja-pokja di Kulenprogo, Banguntapan,

Umbulharjo, dan Presidium Pokja DIY-Jateng yang baru. Mereka telah melakukan berbagai kegiatan

pertemuan masyarakat dan pendidikan publik tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

2. Adanya hasil penelitian tentang peta persoalan keamanan di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Tim Pokja masyarakat dengan supervisi PUSHAM UI.
3. Emerbitkannya buletin selama 6 edisi dengan jumlah 6000 eksemplar yang disebar ke berbagai pihak.
4. Adanya kegiatan kebudayaan di Kulenprogo dengan tema keamanan. Kegiatan ini dihadiri oleh tamu dari Kedubes Denmark untuk RI.
5. Adanya buku/modul training Gender dan COP yang trainingnya akan diselenggarakan tahun 2009 ini.

## Survey Hak Asasi Manusia dan Politik Syariat Islam di Indonesia

### Latarbelakang

Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merupakan salah satu lembaga penelitian tentang Islam dan Hak Asasi Manusia yang setiap tahun melakukan survey dan penelitian tentang isu-isu Hak Asasi Manusia yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan umat Islam di Indonesia. Survey ini merupakan metode secara kuantitatif untuk mengetahui persepsi kalangan aktivis Islam tentang HAM dan kondisi HAM di Indonesia. Survey ini dilaksanakan antara Maret hingga Agustus 2008.

Tujuan dari survey ini adalah:

1. Mengetahui sikap umat Islam atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya kasus pelanggaran HAM yang menimpa dan ditujukan kepada kelompok Islam tertentu
2. Mengetahui sikap umat Islam tentang politik dan gerakan

penegakan syariat Islam di Indonesia

3. Mengetahui sikap umat Islam atas beberapa kasus kontemporer menyangkut isu-isu aktual seperti persoalan demokrasi, ekonomi pasar bebas, politik Indonesia, perempuan, non muslim, pluralisme dan masalah Barat yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan HAM di Indonesia.

### Deskripsi

1. Pembuatan konsep survey
2. Persiapan administrasi dan teknis
3. Penyebaran survey
4. Coding dan decoding data
5. Pembuatan laporan

### Hasil

1. Survey ini berhasil disebarkan kepada dua puluh dua (22) lembaga yang meliputi 11 organisasi

mahasiswa, 7 Partai politik (termasuk Golkar dan PDIP) dan 4 pondok pesantren. Semuanya berada dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Survey ini telah menjangkit 655 responden dari berbagai organisasi mahasiswa, partai politik dan pondok pesantren. Secara gender, survey ini mencapai perbandingan 67,2% responden laki-laki dan 32,8% responden perempuan.

3. Beberapa hasil penting dari survey tersebut antara lain:

a. Pemerintah Indonesia harus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu (Komando Jihad, Usrah, Tanjung Priok, Lampung). Hal ini berdasarkan suara 93,4% responden.

b. Sebanyak 77,3% responden juga setuju bahwa mantan Presiden Soeharto merupakan salah seorang pelaku pelanggaran HAM di masa Orde Baru.

c. Dalam menangani kasus terorisme, sebanyak 76,5% responden juga menilai bahwa Kepolisian RI banyak melakukan pelanggaran HAM.

d. Dalam hal isu penegakan syariat Islam secara formal di Indonesia, sebagai hak sipil & politik umat Islam, sebanyak 43,5% responden tidak setuju, sedangkan 42,4% menyatakan persetujuannya. Lainnya, sebanyak 9,8% tidak punya sikap & tidak tahu-4,3%.

## Riset Putusan Hakim Berbasis Hak Asasi Manusia Tahap III

### Latarbelakang

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penegakan hukum di sebuah negara. Implikasinya adalah putusan merupakan hasil yang paling penting dari sebuah proses peradilan. Perjalanan sejarah peradilan di Indonesia masih menunjukkan sebuah fenomena yang mengherankan, karena putusan pengadilan tidak lagi menyuarakan keadilan, tetapi lebih sebagai bentuk kompromi antara dua kepentingan dan bahkan tidak sedikit putusan pengadilan yang menjadi alat hegemoni kekuasaan atas masyarakat. Putusan yang hegemonik ini lazimnya muncul akibat persekutuan antara masyarakat *vis a vis* negara dan/atau masyarakat *vis a vis* perusahaan besar dan/atau masyarakat *vis a vis* perusahaan yang berkolaborasi dengan negara.

Putusan yang hegemonik tersebut perlu mendapat perhatian dari masyarakat luas karena akan berimbas secara langsung terhadap kehidupan masyarakat. Perhatian masyarakat dapat diwujudkan berupa penelitian atau bahkan eksaminasi putusan. Hingga saat ini, tradisi penelitian terhadap putusan hakim ini relatif masih sangat rendah, sehingga perlu untuk didorong terus menerus. PUSHAM UI mengambil inisiatif untuk melakukan pengujian terhadap putusan hakim bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### Deskripsi

Rangkaian penelitian ini dilakukan oleh lima PUSHAM di berbagai universitas se-Indonesia, antara lain PUSHAM Universitas Surabaya, PUSHAM Universitas Trisakti, PUSHAM

Universitas Islam Indonesia, PUSHAM Universitas Negeri Padang, PUSHAM Universitas Universitas Cenderawasih Papua.

PUSHAM UII dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara dan pengelola administrasi kegiatan serta reviewer bagi hasil penelitian yang dilakukan oleh Puscham-puscham yang lain.

## Hasil

Secara umum, hasil penelitian tersebut menemukan kecenderungan umum bahwa putusan hakim di berbagai pengadilan di Indonesia masih bersifat legalistik formal, legalistik positifistik, kaku, dan tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## Launching Buku Ajar “Hukum Hak Asasi Manusia”

### Latarbelakang

Pendidikan hak asasi manusia menjadi bagian paling penting dalam pendidikan hukum di Indonesia, namun hal itu tidak dibarengi

dengan penyediaan buku yang memadai agar proses pendidikan lebih efektif. Pada tahun 2005, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan serangkaian semiloka yang dimaksudkan untuk mencari rumusan silabi mata kuliah Hak



Asasi Manusia bagi mahasiswa fakultas

hukum. Semiloka tersebut dihadiri oleh seluruh pengajar mata kuliah Hak Asasi Manusia dari berbagai fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia.

semiloka tersebut menghasilkan silabi lengkap dan kemudian merekomendasikan kepada PUSHAM UII untuk sekaligus menyusun buku ajar hak asasi manusia. Rekomendasi tersebut kemudian dilaksanakan oleh PUSHAM UII dengan membentuk tim penulis yang



terdiri dari 15 orang, pakar Indonesia dan pakar internasional.

Tim penulis bertugas menulis materi ajar sesuai dengan kesepakatan semiloka yang diselenggarakan sebelumnya. Tim tersebut merampungkan penulisan materi buku dan akhirnya pada awal tahun 2008, buku tersebut diterbitkan dan diberi judul "Hukum Hak Asasi Manusia". Buku tersebut merupakan minimal hingga disusunnya laporan ini—buku yang paling komprehensif membahas hak asasi manusia dari segala aspeknya.

## Deskripsi

Buku tersebut diluncurkan pada tanggal 19 April 2008, bertempat di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta dalam sebuah seminar sehari. Seminar dilakukan dengan mengundang 20 orang pengajar mata kuliah Hak Asasi Manusia dari berbagai fakultas hukum di berbagai universitas dan komponen akademik dan aktifis hak asasi manusia di Yogyakarta. Rangkaian seminar sehari ini diawali dengan peluncuran buku yang dilakukan oleh Prof. Dr. Edy Suandi

Hamid, M.Ed (Rektor Universitas Islam Indonesia) dan kemudian diikuti dengan seminar dengan narasumber Prof. Franz Magnis Suseno (guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta), Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M (hakim agung Republik Indonesia) dan Prof. Mach Anderson (Direktur Norwegian Centre for Human Rights). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meluncurkan buku Hukum Hak Asasi Manusia untuk dikonsumsi oleh publik terutama akademisi hukum—sebagai bagian dari penguatan masyarakat sipil.

## Hasil

Kegiatan ini memberikan hasil yang sangat bagus. Hal ini terlihat dari penerimaan masyarakat atas buku tersebut dan ketegangan masyarakat untuk mengakses buku tersebut. Buku Hukum Hak Asasi Manusia diterbitkan oleh PUSHAM UII secara khusus ditujukan untuk dosen dan mahasiswa fakultas hukum di berbagai universitas se-Indonesia.

## Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan

### Latar Belakang

Kehadiran berbagai perusahaan dan korporasi, termasuk Trans-National Corporation (TNC) dan Multi-National Corporations (MNC), di Indonesia sejauh ini ternyata tidak selamanya berdampak positif bagi pembangunan. Di satu sisi, kehadiran berbagai korporasi memang memiliki dampak positif, antara lain dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi aset pembangunan nasional maupun daerah. Namun di sisi lain, pertumbuhan industri dan kehadiran berbagai korporasi juga kerap menimbulkan banyak isu negatif seperti kemerosotan antargolongan pendapatan, antarwilayah dan antarkelembok masyarakat. Masyarakat yang sejak awal telah miskin, kenyataannya semakin termarginalkan dengan kehadiran berbagai jenis korporasi.

Setelah diratifikasinya Kovenan Ekosob pada tahun 2005, perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi bagi pemenuhan hak-hak ekosob yang tercantum dalam konvensi tersebut. Dalam konteks itu maka penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sipil, terutama kalangan akademisi (dosen) tentang tanggungjawab sosial perusahaan sebagai salah satu isu HAM yang penting, mutlak dilakukan agar dosen-dosen sebagai kelompok strategis di daerah dapat menjadi kekuatan kritis dan advokatif bagi kepentingan pekerja, masyarakat dan lingkungan

terhadap kemungkinan perusahaan lain terhadap tanggung jawab sosialnya itu.



Berangkat dari pemikiran di atas, maka

forum workshop dengan tema tanggung jawab sosial perusahaan memiliki relevansi akademik dan sosial untuk dilakukan.

## Deskripsi

Workshop dilaksanakan pada 6-8 Juni 2008 di Jogjakarta Plaza Hotel. Workshop ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari para dosen hukum dan HAM serta para peneliti Pusat Studi HAM se-Indonesia.

Beberapa topik penting yang diangkat dalam workshop ini di antaranya adalah 'Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan', 'Perusahaan dan HAM di Tingkat internasional', 'Mekanisme Hukum Pertanggungjawaban Negara dan Perusahaan yang Melakukan Kejahatan', 'Tanggungjawab Sosial Perusahaan: Kebijakan Negara dan Aspek Legalnya di Indonesia' dan 'Metode Advokasi Memperjuangkan



Pemenuhan Hak Masyarakat atas Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Perusahaan'.

Dalam workshop ini hadir sejumlah pakar dari luar dan dalam negeri. Dari luar negeri hadir Prof. Sarah Joseph, Direktur East Asia Centre for Human Rights, Monash University, Australia dan Ms. Nicola Colman, Legal Adviser of Indonesian Programme, Norwegian Centre for Human Rights, Oslo University, Norwegia. Sementara dari dalam negeri pakar yang hadir di antaranya adalah Prof. Dr. Todung Mulya Lubis (pengacara dan aktivis HAM), Prof. Dr. Arif Annullah (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember), Prof. Dr. Erman Rajagukguk, (pakar hukum bisnis UI), Dr. Edi Suharto (pakar kebijakan publik), Dr. Bidan Khairandy (pakar hukum bisnis UI) dan D. Sario Wermatuban (Business Watch Indonesia).

## Penelitian Komando Jihad Tahap II: Mengungkap Suara Korban

### Latarbelakang

Penelitian Komando Jihad 2008 merupakan kelanjutan riset Komando Jihad tahun 2006 sebelumnya, atas kerjasama antara PUSHAM UI dan ELSAM Jakarta. Pada saat itu, PUSHAM UI dan ELSAM Jakarta memotret dua hal pokok: pertama, peranan negara dalam merancang, menggenapkan dan menghancurkan gerakan Islam yang disebut rezim Soeharto, sebagai gerakan Komando Jihad. Kedua, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara orde baru, sejak masa penangkapan, pemeriksaan yang disertai penyiksaan dan kekerasan, pemenjaraan, peradilan, hingga stigmatisasi. Adapun penelitian tahun 2008 ini lebih memfokuskan pada tiga hal: pertama, bagaimana fakta-fakta penangkapan, penahanan, penyiksaan dan pemenjaraan aktivis Islam. Kedua, bagaimana fakta persidangan dan peradilan saat pada saat itu. Ketiga,

bagaimana latarbelakang sosial, ekonomi, politik para korban serta dampak hak eksoab yang mereka dapatkan. Penelitian ini mengambil fokus lokasi di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, dan mengkaji secara khusus berkas-berkas pengadilan komando Jihad: PH Wates, PH Sleman dan PH Bantul.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Menggali latarbelakang aktivitas ekonomi, politik, sosial dari orang-orang yang dituduh sebagai Komando Jihad.
- Ingin mengetahui pola kejahatan HAM dan institusi yang terlibat, termasuk cara-cara yang digunakan oleh pelaku.
- Ingin mengetahui bagaimana proses kriminalisasi negara kepada para korban melalui pengadilan.
- Ingin mengetahui akibat-akibat yang dialami korban (bisa korban langsung atau keluarga) atas

kriminalisasi negara terhadap mereka.

### Deskripsi

Untuk melakukan penelitian tersebut, dan mencapai tujuan di atas, maka aktivitas yang dilakukan adalah:

- a. Wawancara terhadap korban
- b. Wawancara terhadap keluarga korban
- c. Wawancara dengan saksi
- d. Wawancara dengan mantan pengacara kasus Komando Jihad
- e. Studi pustaka
- f. Penelusuran berita-berita koran/majalah kasus Komando Jihad
- g. Workshop (persiapan lapangan, penulisan laporan)
- h. Pembuatan laporan (progress report dan laporan akhir)

### Hasil

- a. Korban. Korban yang teridentifikasi di Yogyakarta berjumlah lebih dari 100 orang yang secara massal tersebar di beberapa lokasi kejadian: Wates, Masjid Sudirman

dan Masjid Syuhada Yogyakarta. Mereka adalah para aktivis Islam, yang mengkritik beberapa kebijakan politik orde baru.

- b. Kejahatan. Kejahatan yang dilakukan orde baru berupa penangkapan secara sewenang-wenang, penggunaan penempatan (istri) sebagai sandera terhadap target-target tertentu, kekerasan dan penyiksaan selama menjalani interogasi, peradilan yang BAP-nya dibuat oleh grup-grup satuan intelijen yang direkayasa, dan sebagainya. Komamil, Kodam, Korem, Labanda Kodam Diponegoro dan Dengan baik di Yogyakarta maupun Semarang merupakan institusi militer yang terlibat langsung dalam berbagai aksi kejahatan HAM di Yogyakarta.
- c. Kriminalisasi. Proses kriminalisasi terjadi melalui suatu operasi intelijen yang sejak awal mendesainnya di Jawa Barat, kemudian menyebarkan gagasannya di Yogyakarta, berupa pendirian

kembali DI/MIL. Beberapa tokoh kunci seperti Warsan melakukan aksi kekerasan yang kemudian menyeret sejumlah orang dan ratusan orang yang terkait dengan mereka.

d. Akibat. Akibat yang diperoleh

antara lain stigmatisasi yang dialami keluarga korban selama 1 dekade lebih (1979-2000-an), menurunnya kualitas hidup keluarga korban, cacat fisik dan mental yang dialami korban dan anggota keluarga dan lain-lain.

## Riset dan Workshop Hak Masyarakat Adat

### Latarbelakang

Latar belakang dilaksanakannya program ini dapat dideskripsikan ke dalam dua kelompok yaitu berdasarkan alasan ideologis dan alasan praktis. Alasan pertama berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang memprihatinkan. Sebagai kelompok asli (origin), yaitu kelompok masyarakat yang sudah eksis di tanah air sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, nasib masyarakat adat sangat memprihatinkan. Masyarakat adat



menjadi korban dari program-program

unifikasi yang berimplikasi terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat oleh penguasa orde baru. Selain itu, masyarakat adat dikebiri dan

dibungkam sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sekedar untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka. Hutan lindung dan kebajikan nabati maupun hewani yang terdapat di dalamnya diambil paksa oleh penguasa atas dasar kepentingan negara (kepentingan umum). Hutan-hutan tempat mereka mengalami



kehidupan diambil alih dengan dalih pengelolaan hutan dan

pembangunan taman nasional. Pada akhirnya, kekayaan mereka yang telah mereka rawat sedemikian panjang diambil dan hutan mereka menjadi rusak.

Melalui berbagai program, pemerintah berhasil memberangus identitas lokal masyarakat adat. Masyarakat adat kehilangan jati diri dan kekayaan mereka. Akhirnya masyarakat adat hanya menjadi obyek pembangunan dan melihat kekayaan mereka diambil, dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemerintah dan mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun dari eksploitasi terhadap kekayaan mereka.

Alasan kedua adalah berkaitan dengan rekomendasi dari workshop masyarakat adat yang telah dilaksanakan oleh PUSHAM UI pada tahun-tahun sebelumnya. Workshop

tersebut merekomendasikan kepada PUSHAM UI untuk menyelenggarakan riset tentang pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia.

## Deskripsi

Rangkaian program riset ini terdiri dari 3 (tiga) program



yaitu workshop penyusunan alur penelitian, penelitian lapangan dan workshop hasil penelitian. Program pertama dilaksanakan untuk menyusun kerangka bersama tentang substansi, metodologi dan sistematika laporan penelitian. Program kedua adalah penelitian lapangan yaitu pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia yang diwakili oleh tiga masyarakat adat yaitu (1) masyarakat adat Puluy, di Kalimantan Timur (2) masyarakat adat Bapan di Lombok Barat dan (3) masyarakat adat Ngata Tera di Palu, Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian lapangan kemudian diseminarkan selama tiga hari dengan mengundang 40 orang peserta yang

tendiri dari dosen pengajar mata kuliah hak asasi manusia pada fakultas hukum di berbagai universitas di Indonesia dengan narasumber antara lain Dr. Saefroedin Bahar (Sekjen Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat), Suparman Marzuki, S.H., M.Si (PUSHAM UI), Sentot Setyosuwanto, S.Sos (ELSIat), Annan Yorkul (International Expert on Indigenous Peoples Rights).

### Hasil

Kegiatan ini menghasilkan tiga dokumen besar tentang perlindungan

dan pemenuhan hak masyarakat adat di tiga wilayah di Indonesia. Secara umum kondisi hak masyarakat adat sangat memprihatinkan dan perlindungan yang di dapat dari pemerintah sangat minimal. Tiga dokumen besar ini merupakan potret kondisi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan untuk melakukan studi tentang masyarakat adat, dan juga dapat digunakan sebagai bahan akademik penyusunan kebijakan untuk melindungi masyarakat adat.

## Launching Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru SMA



### Latarbelakang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

memberikan amanat kepada pemerintah dan kepada stakeholder masyarakat Indonesia untuk melakukan diseminasi hak asasi manusia, baik melalui jalur formal maupun jalur informal. Jalur formal yang dimaksud adalah jalur lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar bagi diseminasi pengetahuan hak asasi manusia serta menjadi lembaga





berbagai sekolah di Yogyakarta menginspirasi PUSHAM UII untuk menulis buku ajar hak asasi manusia bagi guru Sekolah

Menengah Atas. Usaha ini dilakukan selama tiga bulan, dan setelah selesai ditulis oleh empat penulis dari PUSHAM UII, buku tersebut diterbitkan dicetak sebanyak 1500 eksemplar. Buku tersebut diberi judul "Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru SMA". Pada tanggal 13 September 2008, buku tersebut diluncurkan oleh Prof. Suyanto (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) di hotel Senika dengan mengundang seluruh guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan jajarannya di pendidikan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Peluncuran buku tersebut diikuti dengan seminar dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Muryadi (Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Edo Prasetyo (Pengamat Pendidikan dari PUSHAM UII).

tempat persebaran kesadaran hak asasi manusia bagi masyarakat umum.

Praktek diseminasi hak asasi manusia di lingkungan pendidikan ternyata tidak seideal seperti perintah RANHAM. Para guru yang dibebani untuk mengajar materi hak asasi manusia sama sekali tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai, sehingga para guru mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mengajarkan materi tersebut. Menghadapi kesulitan tersebut, para guru baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) meminta PUSHAM UII untuk membantu mengajar materi hak asasi manusia di kelas-kelas di berbagai sekolah.

## Deskripsi

Banyaknya permintaan dari

Menengah Atas. Usaha ini dilakukan selama tiga bulan, dan setelah selesai ditulis oleh empat penulis dari PUSHAM UII, buku tersebut diterbitkan dicetak sebanyak 1500 eksemplar. Buku tersebut diberi judul "Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru SMA". Pada tanggal 13 September 2008, buku tersebut diluncurkan oleh Prof. Suyanto (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) di hotel Senika dengan mengundang seluruh guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan jajarannya di pendidikan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Peluncuran buku tersebut diikuti dengan seminar dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Muryadi (Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Edo Prasetyo (Pengamat Pendidikan dari PUSHAM UII).

## Riset dan Workshop Status Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Nanggroe Aceh Darussalam, D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Timur

### Latarbelakang

Indonesia telah menandatangani Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005. Dengan demikian, negara Indonesia beserta seluruh organnya, termasuk pemerintah daerah, terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan tersebut, termasuk kewajiban untuk dengan segera mengambil langkah-langkah dalam upaya mewujudkan secara progresif hak-hak yang tercantum di dalamnya.

Dalam kaitan ini penting untuk melihat dan menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan secara bertahap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*capacity*) pemerintah

untuk melindungi dan memajukan hak asasi. Perbedaan ini penting dilakukan karena seringkali pemerintah tidak memenuhinya dalam melaksanakan hak asasi dengan dalih kurangnya sumberdaya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya komitmen. Sering dengan otonomi daerah yang sudah diberlakukan, penting juga kemudian untuk mengukur komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dan pemenuhan dan perlindungan hak asasi.

Untuk memahami lebih dalam



komitmen dan kapasitas serta problem yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan maka perlu dilakukan penelitian. Untuk membuat penelitian menjadi lebih menarik dan terarah penelitian ini



hanya akan difokuskan pada pemenuhan hak atas pendidikan dan perumahan. Untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut juga perlu diselenggarakan sebuah forum workshop khusus.

## Deskripsi

Penelitian tentang Status Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Panggroe Aceh Darussalam, B.J. Yogyakarta, dan

Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, PUSHAM UII melibatkan tim peneliti dari jaringan Pusham yang berada di lokasi penelitian, yakni Mirza Al Fath S., S.H., M.H. dari Universitas Melikussaleh untuk meneliti di dua kabupaten yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Panggroe Aceh Darussalam dan Yahya A. Zein, S.H., M.H. dari Universitas Borneo untuk meneliti di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan di Kalimantan Timur. Sedangkan Tim peneliti PUSHAM UII melakukan penelitian di Kabupaten Siemas, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian berlangsung selama tiga bulan (September-November 2008).

Untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tanggal 16-18 Desember 2008 diselenggarakan Workshop Hasil Penelitian di Hotel Jajaja Plaza. Workshop tersebut dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari para dosen dan peneliti di Pusat Studi HAM di seluruh Indonesia. Sebelum sesi

presentasi hasil penelitian tentang Status Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Tiga Wilayah, workshop juga diisi dengan presentasi oleh sejumlah narasumber mengenai beberapa topik yang terkait dengan hasil penelitian. Topik-topik yang dibicarakan di antaranya adalah "Kerangka Normatif Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan" (disampaikan oleh

Patra M. Zein dari TLBH dan Dr. Ivan A. Hafid, Koordinator Nasional Pencapaian Target Milenium), "Indikator Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan" (disampaikan oleh Nicola Colbran dari NCHR dan Atiqah Nuraini dari Kamnas HAM), dan "Pengalaman Advokasi Hak Atas Pendidikan dan Perumahan" (disampaikan oleh Wardah Hafidz dari Up Link dan Rinta Andriano dari IDEA).

## Workshop Model Pengajaran Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru SMA



### Latarbelakang

Agenda workshop ini dilakukan untuk merindaklanjuti rangkaian agenda launching buku ajar yang telah

dilakukan pada bulan sebelumnya. Di dalam acara launching buku tersebut, disepakati bahwa para guru membutuhkan acara untuk membaca dan mencermati secara lebih detail tentang substansi buku tersebut serta mengidentifikasi metode pengajaran yang cocok dengan materi hak asasi manusia.

Menjawab kebutuhan para guru tersebut, maka PUSHAM UII dengan

bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia menyelenggarakan workshop tentang Substansi dan Metodologi Pengajaran Buku Ajar Hak Asasi Manusia Edisi Guru SMA.

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008, bertempat di Jogjakarta Plaza Hotel, dengan mengundang 60 orang peserta yang terdiri dari guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai Sekolah Menengah Atas dan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.



## Deskripsi

Workshop ini dilakukan dengan rangkaian seminar dan diskusi kelompok. Secara kronologis, workshop

ini dimulai dengan pemaparan materi tentang hak asasi manusia secara umum oleh Prof. Soetandjo Wigjosoebroto. Di dalam seminar ini terjadi dialektika yang sangat kuat antara peserta dan narasumber dan terjadi perubahan mindset yang luar biasa dari kalangan peserta tentang hak asasi manusia khususnya bagaimana cara melihat seorang murid dari perspektif hak asasi manusia. Seminar ini menemukan momentum yang sangat bagus karena narasumbernya adalah seorang pakar, seorang ahli dan seorang Profesor Hukum yang dikenal sebagai guru yang sangat berhasil dalam mengajar mahasiswa. Kelebihan seminar ini adalah materi hak asasi manusia disampaikan dengan pendekatan kultural dan bukan pendekatan legal, sehingga para pesertayang kesemuanya adalah para pendiditimerasa enjoy dan menerima perspektif baru ini dengan nyaman.

Rangkaian kedua workshop ini adalah diskusi kelompok. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok besar dengan

ketentuan kelompok pertama, mendiskusikan tentang substansi hak asasi manusia yang tercakup di dalam Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru



SMA. Kelompok ini akan menjawab beberapa persoalan yaitu apakah materi yang tercakup di dalam buku tersebut sudah mampu menjawab kebutuhan para guru untuk mengajarkan materi hak asasi manusia di kelasnya masing-masing, apakah kekurangan buku tersebut sehingga perlu dilakukan revisi. Kelompok kedua, mendiskusikan bagaimana metodologi yang cocok untuk menyampaikan

materi hak asasi manusia kepada para murid. Kelompok kedua ini berhasil mengidentifikasi berbagai metodologi pengajaran yang cocok untuk mengajarkan hak asasi manusia. Di luar metodologi yang sangat beragam, satu metode yang dianggap sebagai metode yang potensial untuk berhasil adalah metode-partisipatif.

#### Hasil

Akhirnya, workshop ini memunculkan dua kesimpulan besar yaitu secara substansif Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Edisi Guru SMA dirasa cukup komprehensif namun bahasanya terlalu kaku dan kurang populer. Kesimpulan kedua, dalam mengajarkan materi hak asasi manusia dapat digunakan berbagai metodologi yang variatif agar proses pengajaran berjalan efektif dan menyenangkan.

## Bagian Umum

Sama seperti laporan tahunan sebelumnya, aktifitas Bagian Umum lebih kepada pemeliharaan dan penambahan inventaris kantor yang dibutuhkan serta penambahan koleksi buku perpustakaan.

### A. Buku



Hingga Desember 2008, PUSHAM UI telah memiliki 1509 judul dengan penambahan sekitar 202 judul buku dari 1300 judul pada tahun sebelumnya.

Tahun ini, PUSHAM UI juga telah

menerbitkan beberapa alat kampanye seperti bulletin, majalah, komik dan buku. Menambah terbitan tahun sebelumnya, pada tahun 2008 PUSHAM UI telah menerbitkan beberapa buku, yaitu:

1. "Mukim Hal-Asal Monevii"  
Penulis: Rhona R.M. Smith, et al
2. "Buku Ajar Hak Asasi Manusia Edisi Guru SMA"  
Penulis: Tim PUSHAM UI
3. "Wegana Ani Tanpa Mukim: Catatan Penyelenggara Jalanani"  
Penulis: Dr. Ardiyo Alkobar,



S.H., LL.M.

#### 4. "Inilah Buku PAAR untuk Aigpol!"

Penulis: Tim PUSHAM UII

#### B. Peralatan Kantor

Tahun 2008 ini, PUSHAM UII telah membeli beberapa peralatan penunjang aktifitas kantor sebagai



tambahan inventaris kantor pada tahun sebelumnya. Beberapa tambahan peralatan penunjang aktifitas kantor tersebut adalah 1 unit komputer Pentium IV Core 2 Duo E 4600, 1 unit monitor computer LG 17" 7305HK, 1 unit speaker CST 5300, 4 unit komputer Intel Pentium IV Dual Core 2.0

(2180), 4 unit UPS Kenko 600V, 4 unit tape recorder Sony TCN 200PV, 1 unit MP3 Samsung YP-U3 1 GB (handsfree-charger USB), 1 unit MP3 Creative Zen Nano Plus 1GB (handsfree-charger USB), 1 unit Tripod Handycam WT 3550, 1 unit statokan tripod Welbon, 1 unit kamera digital Canon bus 80 0, 3 unit meja kerja blockboard & multiplex, 4 unit meja komputer blockboard & multiplex, 1 unit meja front office kecil blockboard & multiplex, 1 unit partisi front office



blockboard & multiplex, 1 unit backdrop front office blockboard & multiplex.

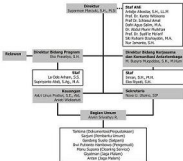


**REALISASI PROGRAM TAHUN 2008**

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta	Sumber Dana
1.	Bangkitan Program COPD 1. Penguatan Kapasitas Raja COP 2. Penelitian Model Keamanan Masyarakat 3. Penerbitan Bulletin 4. COP Budget 5. Penyusunan Model Training	1 Januari - Desember 2008	Wilayah DKI dan Jawa Tengah	Masyarakat dan Kepolisian	The Asia Foundation
2.	Survey Hal Asas Manusia dan Politik Syariat Islam di Indonesia	Februari-Juli 2008	DKI dan Jabang	Peneliti, Pjptol, Mahasiswa	PUSHAM UII
3.	Event Peluncuran Hakam Berbasis HAM tahap II	Februari-Juli 2008	Arah, Ambar, Paku, Pontianak dan Kupang	-	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway
4.	Launching Buku Ajar HAM "Hukum dan Hak Asasi Manusia"	11 April 2008	Hyatt Regency Hotel	Perwakilan Fakultas Hukum dari berbagai Universitas di Indonesia, Dosen Pengajar Hukum dan HAM serta beberapa organisasi lokal	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway
5.	Workshop Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP)	6-8 Mei 2008	Jakarta Rusa Hotel	Dewan pengajar Hukum dan HAM dari berbagai universitas di Indonesia	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway
6.	Event Komando Jihad Tahap II: Mengungkap Suara Korban	Agst- Desember 2008	DKI	Korban dan keluarga korban	PUSHAM UII- LSAH
7.	Event tentang Hak Masyarakat Adat	April-Agustus 2008	Sulawesi Enghah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan	Masyarakat Adat di 3 wilayah penelitian	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway

No.	Kejadian	Waktu	Tempat	Peserta	Sumber Dana
8.	Launching Buku Ajar HAM Cefal Guru SMA	12 September 2008	Hotel Sampoerna Tegayakarta	Perwakilan Panitia perwakilan guru PPHDI SMA, perwakilan LSM/Lembaga Independen, dan perwakilan siswa SMA	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway
9.	Kursus Hutan (Ekonomi, Sosial dan Budaya)	September- Desember 2008	DRI, NAD, Kalimantan Timur	Pemerintah Daerah dan Masyarakat di 3 wilayah penelitian	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway
10.	Workshop Model Pengajaran Buku Ajar HAM Cefal Guru SMA	27 Oktober 2008	Hotel Jajagala La Plaza	Perwakilan Guru PPHDI SMA di Tegayakarta	Norwegian Centre for Human Rights University of Oslo, Norway

## Struktur Organisasi



## Laporan Keuangan

### Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2008

No.	Nama Proyek/Program	Levelling Dasar	Jumlah Dana (Rp)	% dari	Jangka Waktu
1.	Mendongeng Kapasitas Forum Al-Qol, Pokja GDP dan Politik dalam Penerapan GDP di Jawa Tengah	1st	955.800.000	30,14%	Januari 2008 - Desember 2008
2.	Riset Putusan Hakim Berbasis HAM Tahap II	HC-RI	647.274.000	19,67%	Februari - Juli 2008
3.	Launching Buku Ajar Hak-Hak Manusia & Hak Asasi Manusia <sup>2</sup>	HC-RI	116.400.000	3,54%	April 2008
4.	Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan	HC-RI	307.487.140	9,34%	Mei 2008
5.	Riset Komando Jihad Tahap II	RI, SARA, AKA/PIA	20.000.000	0,61%	Mei 2008 - Desember 2008
6.	Riset tentang Hak Masyarakat Adat	HC-RI	609.529.500	18,52%	April 2008 - Agustus 2008
7.	Launching Buku Ajar Hak-Hak Dasar Guru MAI	HC-RI	24.100.000	0,74%	September 2008
8.	Riset Persepsi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	HC-RI	500.487.400	15,17%	September 2008 - Desember 2008
9.	Workshop Model Pengajaran Buku Ajar HAM BSMI Guru MAI	HC-RI	60.134.000	1,83%	Oktober 2008
Total			3.249.812.440	100,00%	

### Presentase Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2008



## Pengelolaan Dana Program Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Tahun 2008

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Diterima (Rp)	Sub Total	%
1.	Mendukung Kapasitas Timana-Aspiol, Peleja CDP dan Sipil dalam Penerapan CDP di Jawa Tengah	IAI	995.000.000	995.000.000	30,24%
2.	Riset Peluasan Hak-hak Berkeadilan, HAM Tahap II	MCHR	447.374.000	2.275.823.440	69,16%
	Launching Buku Ajar Hak "Mukam & Hak Asasi Manusia"		115.600.000		
	Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan		207.487.560		
	Riset tentang Hak Masyarakat Adat		609.508.500		
	Launching Buku Ajar HAM Extra-Coury SMA		34.100.000		
3.	Riset Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	ELSAM	500.487.400	20.000.000	6,17%
	Workshop Model Pengajaran Buku Ajar HAM Extra-Coury SMA		60.104.000		
Total			3.290.823.440	3.290.823.440	100,00%

Presentase Pengelolaan Dana Program  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
Tahun 2008

